



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (BP3KP)
Sulawesi I**

Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman

2025

—

2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, sebagai langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan program yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tiap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 – 2029, yang diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan serta anggaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama proses penyusunan renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Nyaman, Tertata, dan Berkelanjutan".

Manado, 26 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, *dk*



ERPIKA ANSELA SURIRA, S.T.
NIP. 19821022200605 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 KONDISI UMUM	5
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	15
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	22
2.1. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.....	22
2.2. Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	27
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.....	33
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	36
3.3.1 Jumlah SDM pada Balai P3KP Sulawesi I	36
3.3.2 Kerangka Kelembagaan di Balai P3KP Sulawesi I.....	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
4.1 Target Kinerja	40
4.2 Kerangka Pendanaan.....	40
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulut.....	8
Tabel 1.2 Data Backlog Perumahan Provinsi Sulawesi Utara.....	8
Tabel 1.3 Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku Utara	10
Tabel 1.4 Data Backlog Perumahan Provinsi Maluku Utara.....	11
Tabel 1.5 Tabel Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.....	12
Tabel 1.6 Data Backlog Perumahan Provinsi Gorontalo	12
Tabel 1.7 Capaian Kinerja BP2P Sulawesi I Menurut Renstra Balai Tahun 2019 – 2024	14
Tabel 2.1 Program kegiatan, sasaran, indikator kegiatan, dan target pada Sasaran Pembangunan Tahun 2025 – 2029	26
Tabel 3.1 Jumlah dan Komposisi Tingkat Pendidikan	37
Tabel 4. 1 : Rekap Target Program Kegiatan BP3KP Sulawesi I	41
Tabel 4. 2 : Tabel Rekap Keuangan Sasaran Program Kegiatan BP3KP Sulawesi I.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara	7
Gambar 1.2 Peta dan Luas Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	10
Gambar 1.3 Peta dan Luas Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo	11
Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Sulawesi I	24
Gambar 2.2 Pohon Kinerja.....	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi I TA. 2025	36
Gambar 3.2 Struktur Balai P3KP Sulawesi I.....	39



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Renstra BP3KP Sulawesi I merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2025-2029) yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Transformasi kelembagaan ini terjadi seiring dibentuknya Kementerian PKP melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024. Renstra Kementerian PKP ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang juga menjadi tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Renstra BP3KP Sulawesi I ini merupakan penjabaran teknis di tingkat satuan kerja atas Rencana Strategis tiap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan Sekretariat Jenderal, yang merupakan penurunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain berpedoman pada RPJMN 2025–2029, penyusunan Renstra ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan harus mempertimbangkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based planning*) serta unsur inovasi.

1.1 KONDISI UMUM

BP3KP Sulawesi I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I) adalah hasil dari reorganisasi dan transformasi kelembagaan yang signifikan dari entitas sebelumnya, yang dulunya dikenal sebagai BP2P Sulawesi I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I), di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Transformasi ini terjadi seiring dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pergeseran kelembagaan tersebut:

1. Entitas Sebelumnya: BP2P Sulawesi (di bawah Kementerian PUPR)

- **Kedudukan Awal** : Sebelum reorganisasi, BP2P Sulawesi I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I) merupakan unit kerja yang dibentuk pada Juni 2020 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan) Kementerian PUPR.

- Wilayah dan Tugas : BP2P Sulawesi I berkedudukan sebagai Balai Kelas I dan mengemban tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
- Fokus Program : Tugas utama Ditjen Perumahan adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Laporan kinerja BP2P Sulawesi I Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian PUPR periode 2020–2024.

2. Transformasi dan Pembentukan Kementerian PKP:

- Dasar Hukum dan Waktu Pembentukan :
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, dengan Menteri pertama dilantik pada Oktober 2024.
- Skema Reorganisasi :
Pembentukan Kementerian PKP melibatkan transformasi kelembagaan yang signifikan dengan menyerap fungsi-fungsi terkait perumahan dan kawasan permukiman yang sebelumnya tersebar di beberapa Unit Eselon I di Kementerian PUPR. Fungsi-fungsi yang diintegrasikan meliputi:
 - a) Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan), yang fokus pada penyediaan perumahan.
 - b) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK).
 - c) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Model Baru :
Transformasi ini menandai pergeseran paradigma kelembagaan dari pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah dan menegaskan fokus pada dua aspek utama: perumahan dan kawasan permukiman.

3. Entitas Saat Ini : Balai P3KP Sulawesi I (Kementerian PKP)

- Kedudukan Baru :
Setelah reorganisasi, BP2P Sulawesi I bertransformasi menjadi BP3KP Sulawesi I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I), yang merupakan salah satu dari 19 Balai yang dibentuk di seluruh Indonesia, yang

menaungi 3 Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara.

- Tanggung Jawab :

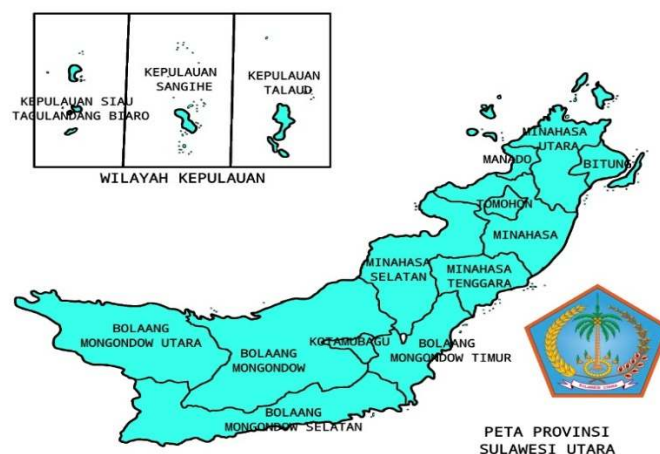
BP3KP Sulawesi I bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (karena memiliki garis komando) namun juga berkoordinasi dengan unit organisasi lainnya meliputi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan Sekretariat Jenderal.

- Fungsi yang Diperluas :

Fungsi BP3KP diperluas untuk mencakup tidak hanya penyediaan perumahan tetapi juga pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset, di samping fungsi administrasi dan pengawasan internal.

➤ **Satuan Kerja Perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Utara**

Provinsi Sulawesi utara merupakan provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis khatulistiwa. Secara geografis, wilayah ini terletak pada 0°LU-3°LU dan 123 BT-126 BT. Wilayah ini memiliki 11 kabupaten dan 4 kota yang terdiri dari 171 kecamatan dan 1838 desa. Area Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya berada dalam 1 pulau. Provinsi ini memiliki 294 pulau dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Sangihe. Ibukota provinsi ini adalah Kota Manado.



Gambar 1.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.1 Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulut

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Bolaang Mongondow	Lolak	3291.24	22.72	6
Minahasa	Tondano	1128.25	7.79	2
Kepulauan Sangihe	Tahuna	596.46	4.12	144
Kepulauan Talaud	Melonguane	1009.74	6.97	19
Minahasa Selatan	Amurang	1455.91	10.05	4
Minahasa Utara	Airmadidi	992.98	6.85	59
Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1643.86	11.35	12
Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau	215.61	1.49	55
Minahasa Tenggara	Ratahan	752.79	5.2	25
Bolaang Mongondow Selatan	Bolang Uki	1772.83	12.24	5
Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	859.68	5.93	11
Kota Manado	Manado	161.76	1.12	3
Kota Bitung	Bitung	329.36	2.27	36
Kota Tomohon	Tomohon	169.06	1.17	-
Kota Kotamobagu	Kotamobagu	108.89	0.75	-
Sulawesi Utara	Manado	14488.43	100	382

Sumber :

<https://sulut.bps.go.id/id/statistics/table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara--2005.html>

Backlog menggambarkan kekurangan rumah yang ada di suatu wilayah. Idealnya satu rumah dihuni oleh satu keluarga. Apabila dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga maka akan dianggap sebagai *Backlog*. Berdasarkan data dari *Dashboard MyPKP* Kementerian PKP, jumlah *Backlog* di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Backlog Perumahan Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kulaitas	Total Backlog Perumahan
1	Kota Manado	27.148	6.826	33.974
2	Kab. Minahasa	21.188	8.98	30.168
3	Kab. Bolaang Mongondow	10.918	16.276	27.194
4	Kab. Minahasa Selatan	12.255	8.536	20.791
5	Kota Bitung	12.761	5.371	18.132
6	Kab. Kepulauan Sangihe	5.734	10.002	15.736
7	Kab. Minahasa Utara	10.316	5.161	15.477
8	Kota Kotamobagu	6.468	4.699	11.167
9	Kota Tomohon	6.647	3.782	10.429
10	Kab. Minahasa Tenggara	5.412	4.884	10.296
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.403	5.981	9.384
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.717	6.456	9.173
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.933	5.517	8.45
14	Kab. Kepulauan Talaud	1.539	3.812	5.351
15	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.69	2.496	4.186
	Total	131.129	98.779	229.908

Sumber: https://my.pkp.go.id/dashboardhome?utm_source=chatgpt.com

➤ **Satuan Kerja Perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Maluku Utara**

Provinsi Maluku Utara memiliki ciri khas wilayah kepulauan dan maritim. Provinsi ini terdiri atas satu pulau besar, yaitu Pulau Halmahera, yang di dalamnya mencakup lima wilayah administrasi kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Barat, serta sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan yang meliputi Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Kota Sofifi memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, simpul koordinasi pembangunan, dan penghubung utama antarwilayah di provinsi ini. Sementara itu, lima kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, dan wilayah lain dari Kota Tidore Kepulauan di luar Pulau Halmahera, tersebar di berbagai pulau dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara. Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada di antara 2° 50' 59,078" Lintang Utara sampai dengan 2° 42' 7,901" Lintang Selatan dan 124° 7' 15,656" Bujur Timur sampai dengan 130° 7' 23,200" Bujur Timur. Secara administratif, Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas wilayah yang jelas dengan wilayah perairan di sekitarnya. Di sebelah timur, provinsi ini berbatasan dengan Laut Halmahera, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku. Pada bagian utara, wilayah Provinsi Maluku Utara berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah 12.336.217 hektar, berupa daratan seluas kurang lebih 3.147.296 hektar dan wilayah laut yang merupakan wilayah sejauh 12 mil laut dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dengan luas kurang lebih 9.188.921 hektar. Selain itu, Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki 901 pulau.



Gambar 1.2 Peta dan Luas Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Tabel 1.3 Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Halmahera Barat	Jailolo	2237.39	7.11	165
Halmahera Tengah	Weda	2272.26	7.22	40
Kepulauan Sula	Sanana	1777.02	5.65	30
Halmahera Selatan	Ibuha	8102	25.75	463
Halmahera Utara	Tobelo	3402.94	10.81	113
Halmahera Timur	Kota Maba	6487.63	20.62	39
Pulau Morotai	Daruba	2337.26	7.43	38
Pulau Taliabu	Bobong	2984.01	9.48	58
Kota Ternate	Ternate	162.04	0.51	9
Kota Tidore Kepulauan	Soa Sio	1703.43	5.41	14
Maluku Utara	Sofifi	31465.98	100	975

Sumber:

<https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-maluku-utara--2020.html?year=2025>

Backlog menggambarkan kekurangan rumah yang ada di suatu wilayah. Idealnya satu rumah dihuni oleh satu keluarga. Apabila dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga maka akan dianggap sebagai *Backlog*. Berdasarkan data dari *Dashboard MyPKP* Kementerian PKP, jumlah *Backlog* di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data Backlog Perumahan Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kulaitas	Total Backlog Perumahan
1	Kab. Halmahera Selatan	3.973	12.649	16.622
2	Kab. Halmahera Utara	3.251	10.946	14.197
3	Kab. Halmahera Barat	2.726	6.75	9.476
4	Kab. Halmahera Timur	1.412	5.725	7.137
5	Kab. Kepulauan Sula	2.812	3.715	6.527
6	Kota Ternate	4.349	1.882	6.231
7	Kota Tidore Kepulauan	3.312	2.881	6.193
8	Kab. Pulau Morotai	1.218	4.281	5.499
9	Kab. Halmahera Tengah	3.309	2.121	5.43
10	Kab. Pulau Taliabu	650	4.062	4.712
Total		27.012	55.012	82.024

Sumber: https://my.pkp.go.id/dashboardhome?utm_source=chatgpt.com

➤ Satuan Kerja Perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Saat ini wilayah ini memiliki 5 kabupaten dan 1 kota. Secara geografis Gorontalo terletak antara 0°19'-1°15' Lintang Utara dan 121°23'-125°14' Bujur Timur. Berdasarkan letak administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat dan provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur. Di sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.



Gambar 1.3 Peta dan Luas Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Tabel 1.5 Tabel Luas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Boalemo	Tilamuta	1,831.64	15.23	20
Gorontalo	Gorontalo	2,160.18	17.96	-
Pohuwato	Marisa	4,370.66	36.35	52
Bone Bolango	Suwawa	1,888.93	15.71	-
Gorontalo Utara	Kwandang	1,702.75	14.16	55
Kota Gorontalo	Gorontalo	70.83	0.59	-
Gorontalo	Provinsi Gorontalo	12,024.98	100	127

Sumber :

<https://gorontalo.bps.go.id/id/statistics/table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-gorontalo--2021.html?year=2025>

Backlog menggambarkan kekurangan rumah yang ada di suatu wilayah. Idealnya satu rumah dihuni oleh satu keluarga. Apabila dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga maka akan dianggap sebagai *Backlog*. Berdasarkan data dari *Dashboard MyPKP* Kementerian PKP, jumlah *Backlog* di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6 Data Backlog Perumahan Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kulaitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Kab. Gorontalo	29.495	28.186	57.681
2	Kab. Boalemo	7.787	11.202	18.989
3	Kab. Pohuwato	9.102	9.802	18.904
4	Kab. Bone Bolango	9.553	8.014	17.567
5	Kota Gorontalo	12.083	4.278	16.361
6	Kab. Gorontalo Utara	5.701	8.574	14.275
	Total	73.721	70.056	143.777

Sumber: https://my.pkp.go.id/dashboardhome?utm_source=chatgpt.com

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Sulawesi I untuk periode 2025–2029 ini disusun sebagai refleksi atas kinerja yang telah dicapai selama periode 2020–2024 serta respons terhadap dinamika isu-isu perumahan dan aspirasi masyarakat di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Selama periode Renstra sebelumnya (di mana entitas ini dikenal sebagai Balai P2P Sulawesi I), Balai telah berhasil melaksanakan mandat Pemerintah Pusat di sektor perumahan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam kerangka Perjanjian Kinerja (PK), mencapai rata-rata capaian 99,71% pada tahun 2024, yang menempatkan kinerja Balai dalam kategori Baik. Dalam konteks

operasional, BP3KP Sulawesi I menjadi tulang punggung implementasi program padat karya yang bertujuan mengurangi ketidaklayakan hunian (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di mana realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara kumulatif telah melampaui target Renstra 2020–2024 hingga mencapai 96%. Selain itu, komitmen terhadap tata kelola internal juga tercermin dari keberhasilan Balai dalam mempertahankan status sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:201.

Tabel 1.7 Capaian Kinerja BP2P Sulawesi I Menurut Renstra Balai Tahun 2019 – 2024

Indikator Kinerja	Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	BSPS	KSPN	Rusun Yang Dibangun	Rusun Yang Dipelihara	Rusus Yang Dibangun	Pembangunan PSU	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran
TAHUN 2020	4 Laporan	7.900 Unit	463 Unit	0 Unit	5 Tower	0 Unit	0 Unit	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
TAHUN 2021	3 Laporan	5.950 Unit	-	299 Unit	1 Tower	100 Unit	2.586 Unit	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
TAHUN 2022	3 Laporan	4.674 Unit	-	217 Unit	9 Tower	0 Unit	1.246 Unit	-	3 Laporan	3 Laporan
TAHUN 2023	3 Laporan	3.039 Unit	-	224 Unit	9 Tower	114 Unit	1.976 Unit	-	3 Laporan	3 Laporan
TAHUN 2024	3 Laporan	2.140 Unit	-	131 Unit	3 Tower	0 Unit	699 Unit	-	3 Laporan	3 Laporan
Capaian	16 Laporan	23.703 Unit	463 Unit	1.095 Unit	22 Tower	214 Unit	2.675 Unit	6 Laporan	15 Laporan	3 Laporan
Target menurut Restra	15 Laporan	24.939 Unit	463 Unit	1.973 Unit	67 tower	410 Unit	8.884 Unit	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
% Capaian	106%	96%	100%	56%	33%	52 %	30,12%	40 %	100%	100%

Meskipun capaian penanganan RTLH melalui BSPS menunjukkan kinerja yang luar biasa, evaluasi kinerja komprehensif terhadap target Renstra 5 tahun (2020–2024) juga menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan dalam beberapa program infrastruktur dan hunian vertikal. Secara kumulatif, realisasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk rumah umum masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra 5 tahun, masing-masing hanya tercapai sekitar 52% untuk rusun dan 30,12% untuk PSU. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dinamika kebijakan pemfokusan ulang anggaran (*refocusing*) akibat pandemi COVID19, serta kendala teknis dan perencanaan di lapangan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan teknis oleh pengembang MBR untuk mendapatkan bantuan PSU. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Balai tidak hanya harus berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengamanan akuntabilitas aset negara dan keberlanjutan fungsi hunian.

Pada aspek tata kelola dan regulasi, BP3KP Sulawesi I dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mengatasi fragmentasi regulasi di tingkat daerah. Hal ini menegaskan perlunya peran aktif BP3KP sebagai regulator dan fasilitator di tingkat regional untuk meningkatkan pengawasan terhadap NSPK (yang implementasinya masih belum optimal, sekitar 40% di tingkat daerah) dan memperkuat koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah kolaborasi multisektor yang efektif.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

1. Potensi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan berperan strategis dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki potensi antara lain :

- a. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui program nasional seperti Program 3 juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah khusus, rumah susun (rusun) untuk MBR dan Pembangunan PSU untuk perumahan MBR. Selain itu, telah tersedia regulasi dan payung hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RPJMN yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif.
- b. Ketersediaan Data Nasional Terkait Perumahan
Tersedianya data nasional yang mendukung, seperti Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) dan housing queue, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

- c. Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Aktif Pemerintah Daerah Potensi kolaborasi lintas sektor dapat dimanfaatkan secara optimal dengan didorong oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan mengakselerasi pelaksanaan program. Sinergi antar pemangku kepentingan ini dipandang sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan ramah lingkungan melalui APBD/DAU dan sumber anggaran lain yang sah. Dengan pendekatan kolaboratif ini diharapkan berbagai tantangan dalam penyediaan perumahan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti rumah cetak 3D, modular housing, dan penggunaan material ramah lingkungan) serta sistem informasi bantuan perumahan dan permukiman berbasis digital (SIBARU, dll) termasuk Klinik PKP dapat mempercepat pembangunan hunian, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat tata kelola.
- e. Peran sektor swasta dan Lembaga Keagamaan Keterlibatan sektor swasta dan Lembaga Keagamaan memiliki potensi yang besar dalam penyediaan perumahan melalui skema kolaborasi dan sharing pendanaan.

2. Potensi Wilayah

Wilayah kerja Balai P3KP Sulawesi I meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang memiliki karakteristik khas yang menjadi pengembangan perumahan yang meliputi:

a. Provinsi Sulawesi Utara

Potensi perumahan di Sulawesi Utara pada menunjukkan peluang yang sangat baik, didorong oleh kolaborasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta dukungan besar dari pemerintah pusat melalui program "3 Juta Rumah", serta pengembangan infrastruktur strategis. Pemerintah berkomitmen pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja informal, dan korban bencana. Lokasi perumahan yang berpotensi saat ini berpusat di sekitar koridor infrastruktur baru dan area berkembang seperti di kecamatan mapanget kota manado, kabupaten minahasa utara, kota tomohon, dan kota bitung.

b. Provinsi Maluku Utara

Potensi perumahan di provinsi Maluku Utara bertumbuh secara cepat, yang disebabkan oleh lonjakan ekonomi sektor pertambangan dan hilirisasi industri. Pembangunan smelter, yang signifikan memicu pembangunan perumahan bagi karyawan di sekitaran kawasan industri. Pemerintah provinsi maluku utara terus membenahi kualitas hunian masyarakat. Melalui program perbaikan Rumah

Tidak layak Huni yang didanai oleh anggaran belanja pemerintah daerah dan anggaran belanja pemerintah pusat.

c. Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan di sektor perumahan. Perpaduan antara pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta dukungan masif dari program pemerintah pusat, dan tingginya angka *backlog* menjadikan wilayah ini sebagai lahan investasi properti yang menjanjikan. *Backlog* perumahan yang masih tinggi di provinsi gorontalo, serta permintaan pembangunan perumahan yang tinggi, yang datang dari masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga turut andil dalam mendukung kebijakan nasional yaitu program 3 juta rumah. Pemerintah juga mengfokuskan merelokasi warga yang masuk dalam rawan bencana ke kawasan permukiman yang lebih aman dan terintegrasi. Berkembangnya pusat-pusat industri menciptakan kebutuhan hunian bagi para pekerja dan tenaga ahli dari luar daerah.

3. Permasalahan

Secara umum, potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di sisi lain, masih lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan lahan dan infrastruktur dasar, serta tingginya *Backlog* perumahan sebagai akibat rendahnya daya beli masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam percepatan penyediaan perumahan. Selain itu, ketidaksesuaian implementasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta terbatasnya pembiayaan dan perlindungan konsumen, turut memperkuat urgensi penataan sistem penyelenggaraan perumahan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

- a. Tingginya *Backlog* perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (*Backlog*) masih tinggi. Banyak rumah tangga baik di Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo belum memiliki rumah sendiri, tinggal di hunian tidak layak, atau menumpang/mengontrak dengan kondisi sempit dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang semakin meningkat mencerminkan belum optimalnya sinergi program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan, di luar pengembang dan perbankan, dalam upaya gotong royong menyediakan hunian yang layak.
- b. Proses Serah terima Aset Proses serah terima aset belum dilaksanakan dengan baik karena terkendala persyaratan teknis dan administrasi oleh pengusul.

- c. Keterbatasan dukungan anggaran pemerintah daerah Keterbatasan dukungan anggaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Kurangnya Koordinasi Antar Sektor dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan perumahan memerlukan sinergi antara berbagai sector seperti pertanian, perencanaan wilayah, infrastruktur dasar, dan pembiayaan. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah menyebabkan program perumahan kurang efektif atau tidak tepat sasaran.
- e. Perlindungan konsumen perumahan masih minim Seiring dengan pembinaan pengembang kecil yang baru efektif di 35% daerah (Kemenkop UKM, 2024). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hunian dan belum terjaminnya kepastian bagi konsumen, terutama MBR.
- f. Masih rendahnya kualitas teknis bangunan yang dibangun oleh pengembang termasuk ketersediaan PSU perumahan. Data Kementerian PUPR tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 30% tidak memenuhi standar teknis. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan ketentuan teknis dalam proses pembangunan perumahan yang mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat;
- g. Masih tingginya kawasan kumuh perkotaan disebabkan masih rendahnya kualitas teknis bangunan di permukiman perkotaan, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan ketentuan teknis dalam proses pembangunan maupun renovasi bangunan. Pemerintah provinsi sulawesi utara mengfokuskan penanganan kawasan kumuh di Kota, Manado, kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah provinsi maluku utara mengfokuskan penanganan kawasan kumuh di kota ternate, kota tideore kepulauan dan Hdi kota gorontalo, kabupaten gorontalo, kabupaten boalemo dan kabupaten pohnato.
- h. Permukiman di wilayah pesisir dan kawasan rawan bencana belum tertangani secara optimal. Berdasarkan data BNPB (2023) sekitar 17% permukiman pesisir berada di wilayah rawan bencana. Hal ini mencerminkan masih lemahnya integrasi antara perencanaan permukiman dengan upaya mitigasi bencana, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi masyarakat dan keberlanjutan kawasan permukiman;
- i. Akses Pembiayaan yang Terbatas. MBR dan pekerja sektor informal sering kali kesulitan mengakses skema pembiayaan perumahan formal, seperti KPR, karena keterbatasan persyaratan administrasi (misalnya bukti penghasilan tetap dan legalitas lahan/bangunan).

Berikut adalah data Backlog Perumahan Tahun 2025 berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipublikasikan di Dashboard Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Provinsi	Jumlah Keluarga	Backlog Kepemilikan Rumah (%)	Backlog RTLH (%)	Total Backlog (%)
Sulawesi Utara	931.774	14,07	10,6	24,67
Maluku Utara	436,946	6.18	12,59	18,77
Gorontalo	407,136	18,11	17,21	35,32

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, diperlukan suatu analisis strategis yang mampu menggambarkan kondisi internal dan eksternal organisasi secara komprehensif. Analisis Matriks SWOT digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berasal dari faktor internal, serta peluang dan tantangan yang bersumber dari faktor eksternal, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program.

Melalui analisis ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sulawesi I. Hasil Analisis Matriks SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi pelaksanaan program, serta pengambilan keputusan manajerial guna mendukung peningkatan kinerja balai secara berkesinambungan.

Berikut Analisis SWOT Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I:

1. Kekuatan (*Streigth*)

- a. Balai P3KP Sulawesi I Sebagai kepanjangan tangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman , memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran negara (APBN) untuk pembangunan rumah susun rumah khusus, rumah swadaya dan Pengembangan Kawasah Kumuh.
- Balai P3KP Sulawesi I Didukung oleh Sumber Daya manusia (PNS, PPPK, TA) yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

- Balai P3KP Sulawesi I Memiliki akses ke sistem informasi perumahan yang memetakan angka *backlog* dan kebutuhan hunian di Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo.
- Kapabilitas untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dalam penyediaan lahan dan verifikasi penerima manfaat.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang masih dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dalam pelaksanaan program antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis tertentu, khususnya dalam pengelolaan program yang kompleks dan lintas sektor;
- Kapasitas dukungan sarana dan prasarana kerja yang belum sepenuhnya memadai, terutama dalam menunjang monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja berbasis digital;
- Ketergantungan pada kebijakan pusat, yang menyebabkan ruang fleksibilitas balai dalam menyesuaikan program dengan kondisi spesifik wilayah Sulawesi I menjadi terbatas;
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal, terutama dengan pemerintah daerah, sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan pelaksanaan dan keberlanjutan hasil program;
- Perubahan perencanaan dan penganggaran (revisi DIPA) yang relatif sering, sehingga berdampak pada konsistensi target output dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program balai, antara lain:

- Prioritas nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pengurangan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak, yang membuka peluang dukungan anggaran dan kebijakan;
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan perumahan dan permukiman, seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas lingkungan hunian masyarakat;
- Pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru di Kalimantan, yang mendorong kebutuhan program infrastruktur permukiman yang terintegrasi;
- Kemajuan teknologi informasi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja program;

- e. Potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga lain, BUMN, swasta, dan masyarakat, dalam mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program.

4. Tantangan (*Threats*)

Adapun tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I antara lain:

- a. Kondisi geografis wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo yang luas dan beragam, yang berdampak pada tingginya biaya logistik serta kompleksitas pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- b. Keterbatasan kapasitas fiskal dan kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan;
- c. Perubahan kebijakan nasional dan dinamika regulasi, yang dapat memengaruhi arah program, indikator kinerja, maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- d. Risiko sosial dan lingkungan, termasuk resistensi masyarakat, persoalan lahan, serta dampak lingkungan yang memerlukan penanganan khusus;
- e. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan iklim, yang berpotensi memengaruhi stabilitas anggaran serta jadwal pelaksanaan program.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

TUJUAN DAN

SASARAN



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

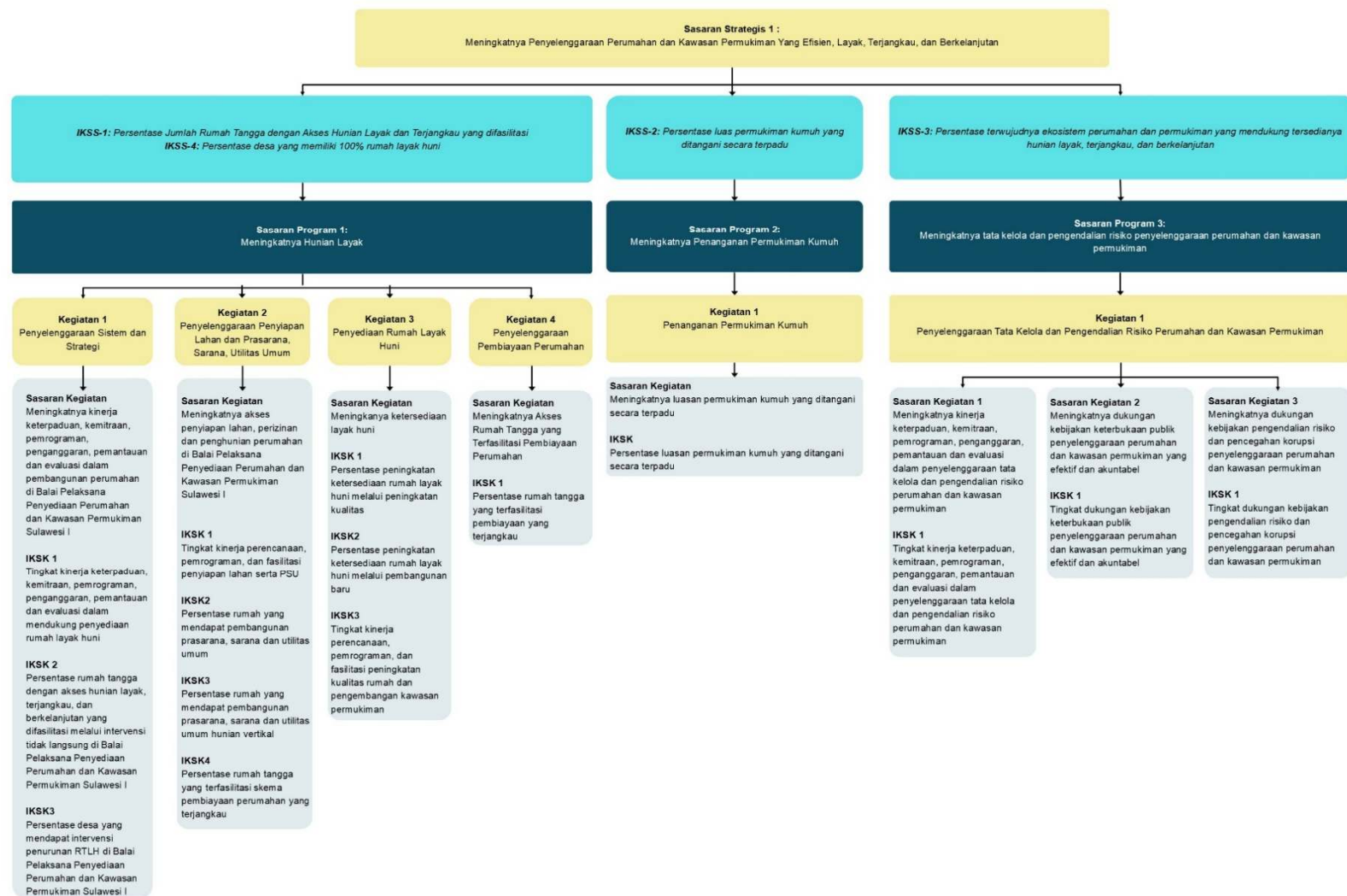
Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029, BP3KP Sulawesi I menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - i. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - ii. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - iii. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - iv. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - v. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - vi. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - vii. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - viii. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen; dan
 - ix. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

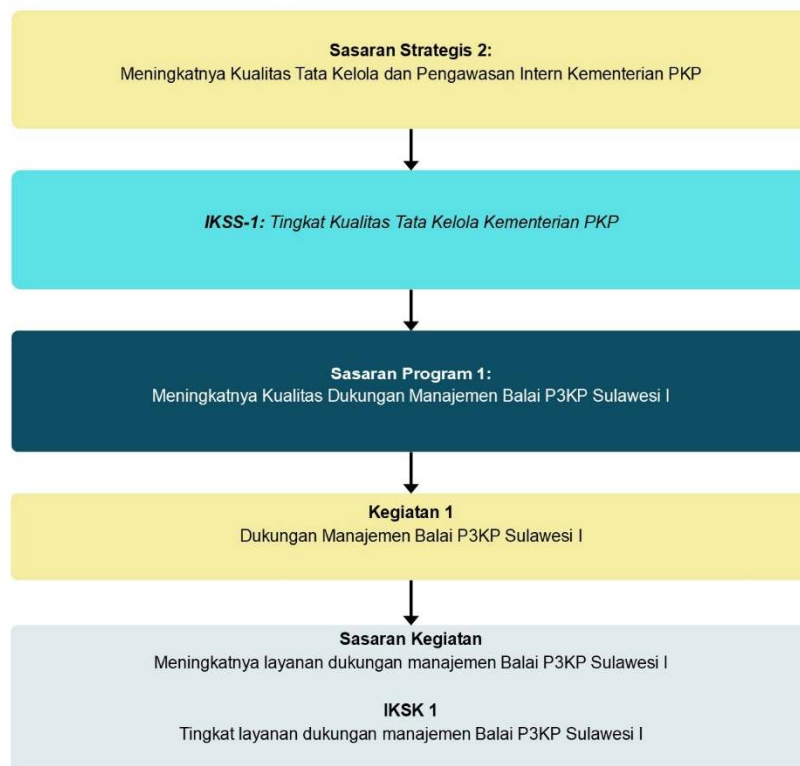
2.2. Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Sasaran program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I diarahkan untuk mendukung terwujudnya penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo. Sasaran tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, antara lain melalui pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, BP3KP Sulawesi I berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang mendukung terbentuknya kawasan hunian yang aman, sehat, serta terpadu. Upaya ini juga diperkuat dengan pelaksanaan hunian vertikal dan proyek strategis nasional agar kebutuhan rumah layak dapat terpenuhi secara merata dan berkeadilan. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, BP3KP Sulawesi I juga menargetkan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan penerima program. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fokus penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan perumahan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat. Melalui sasaran program tersebut, BP3KP Sulawesi I berupaya mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan perumahan nasional. Adapun dua sasaran strategis Kementerian yang menjadi dasar pelaksanaan program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, yaitu:

- a. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja SS sebagai berikut:
 1. IKSS-1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 2. IKSS 2: Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 3. IKSS 3 : Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 4. IKSS 4 : Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Sulawesi I



Gambar 2.2 Pohon Kinerja

Berdasarkan Gambar 2 diatas bagan tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan, arah kebijakan BP3KP Sulawesi I periode perencanaan difokuskan pada dua tujuan utama. Tujuan 1 adalah peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, termasuk penanganan permukiman kumuh secara terpadu serta penguatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan dan akuntabel. Tujuan ini dijabarkan dalam Sasaran Strategis 1, yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja antara lain peningkatan akses hunian layak dan terjangkau, penurunan luas permukiman kumuh, serta terwujudnya ekosistem perumahan yang mendukung keberlanjutan. Implementasinya dilakukan melalui tiga sasaran program, yakni peningkatan hunian layak, peningkatan penanganan permukiman kumuh, serta peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko, yang didukung oleh kegiatan penyelenggaraan sistem dan strategi, penyediaan PSU, penyediaan rumah layak huni, fasilitasi pembiayaan perumahan, serta penataan kawasan kumuh secara terpadu.

- b. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategis: IKSS 1- tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program, kegiatan, sasaran, indikator kegiatan, dan target pada Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029 Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Program kegiatan, sasaran, indikator kegiatan, dan target pada Sasaran Pembangunan Tahun 2025 – 2029

No.	Eselon 1	Program, Kegiatan, Sasaran
1.	Sekretariat Jenderal	➤ Meningkatnya layanan dukungan manajemen.
2.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	➤ Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni. ➤ Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman. ➤ Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman. ➤ Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman
3.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	➤ Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan. Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan. ➤ Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan. ➤ Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan Unit Kerja Pelaksana Kawasan Permukiman Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan
4.	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	➤ Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan.
5.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	➤ Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - b) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - c) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau;
 - d) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - b) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - c) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;

- c) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- e) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan;
- f) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - d) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - a) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - b) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - c) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - d) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
 - e) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - f) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - b) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - c) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;

- d) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - e) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - f) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - g) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- a) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunandan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan anpemerintah pusat dan daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkaitpenyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - e) Penguatan kelembagaan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - c) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - d) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.

4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - e) Penguatan kelembagaan.
5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
8. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

1. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.

2. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
3. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
 - b) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - d) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
4. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - b. Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - c. Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- d. Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
- e. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

e. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- 1) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - a. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - b. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 2) Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - a. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - b. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- 3) Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - a. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi;
 - b. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - c. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- 4) Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - a. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - b. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- 5) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - a. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- 6) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan

- b. Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- 7) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - a. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - b. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- 8) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - a. Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - b. Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- 9) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - a. Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - b. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- 10) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - a. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - b. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Dalam melaksanakan kebijakan nasional pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 maka arah kebijakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I untuk 5 (lima) tahun ke depan 2025 – 2029, yaitu untuk membantu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal “terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, nyaman, tertata, dan berkelanjutan”. Untuk mencapai sasaran target Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun 2025-2029, ditetapkan indikator program sebagai tolak ukur keberhasilan sebagai berikut:

Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi

- a) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
- b) Jumlah dokumen kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu

- c) Jumlah dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- d) Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e) Jumlah dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- f) Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
- g) Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- a. Jumlah Rekomendasi Kebijakan serta Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
- b. Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan PSU
- c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan dan PSU
- d. Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan
- e. Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
- f. Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penyediaan Rumah Layak Huni

- a. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh
- b. Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru
- c. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas
- d. Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK)
- e. Jumlah rumah khusus yang terbangun
- f. Jumlah rumah susun yang terbangun

Kegiatan : Penanganan Permukiman Kumuh

- a. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

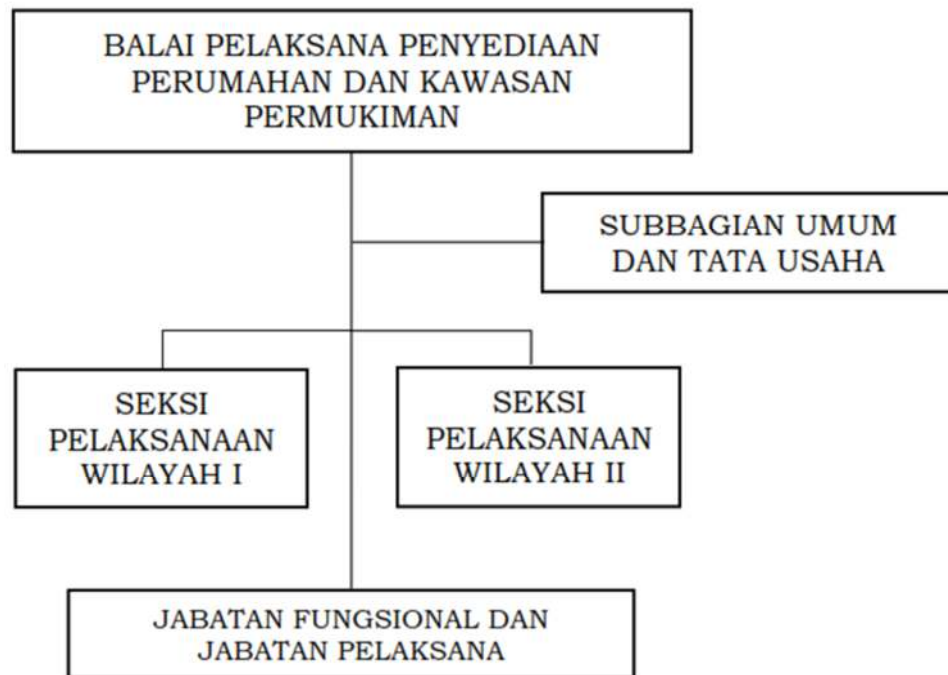
Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah :

1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
3. Penguatan layanan tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas;

4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien;
6. Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya berorientasi pada kuantitas unit rumah, tetapi juga pada pemerataan akses hunian yang layak di seluruh wilayah. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai skema pembiayaan dan sumber pendanaan, sehingga diperlukan pendataan yang terstruktur dan terintegrasi agar setiap intervensi tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta dapat dipertanggungjawabkan. Program PSN 3 Juta Rumah mencakup tiga komponen utama, yaitu:
 - a. Program penyediaan lahan murah atau gratis, dengan memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menyediakan perumahan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang bersumber dari tanah Negara (BMN), tanah BUMN, tanah rampasan Kejaksaan, tanah pengembang, dan tanah di bank tanah, penyediaan lahan oleh pemerintah daerah;
 - b. Pembiayaan Kreatif atau Alternatif, dengan menggerakkan pembiayaan perumahan di luar APBN seperti bekerjasama dengan SMF dengan mekanisme pemupukan dana (Jamsostek, Tapera, dll). Memanfaatkan dukungan likuiditas BI, membuka peluang investasi luar negeri dan bekerjasama dengan danantara untuk penyediaan perumahan, serta donasi perorangan atau CSR perusahaan;
 - c. Penetapan Lokasi, penentuan lokasi target perumahan berbasis Data Perbankan, Data Tapera, Data Bappenas/BPS, dan Data Pemerintah.
7. Dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, BPS dan Bappenas dalam pemanfaatan data agar tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan data berdasarkan pendekatan *By Name By Address* (BNBA) yang disusun oleh BPS. BPS menyediakan data BNBA yang mencakup empat kategori rumah tangga, antara lain BNBA rumah bukan milik sendiri BNBA rumah tidak layak huni milik sendiri, BNBA rumah tidak memiliki akses sanitasi layak, dan BNBA rumah tidak memiliki akses air minum.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sumber daya manusia yang dikelola dengan profesional dan responsif akan melahirkan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi I TA. 2025

Sumber : Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025

3.3.1 Jumlah SDM pada Balai P3KP Sulawesi I

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sebanyak 30 orang yang tersebar di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sebanyak 23 orang di Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara, 23 orang di Satker PKP Gorontalo, dan 26 orang di Satker PKP Provinsi Maluku Utara.

Tabel 3.1 Jumlah dan Komposisi Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	7 Orang
2	Strata 1	73 Orang
3	Diploma IV	2 Orang
4	Diploma I	4 Orang
5	SMA	15 Orang
Jumlah		101 Orang

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan yang tercantum dalam Renstra periode sebelumnya merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Evaluasi terhadap kinerja kelembagaan melalui evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dalam upaya perbaikan sekaligus transformasi sesuai nilai-nilai dalam RPJMN 2025-2029.

3.3.2 Kerangka Kelembagaan di Balai P3KP Sulawesi I

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset di wilayah kerja Provinsi Sulawesi utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

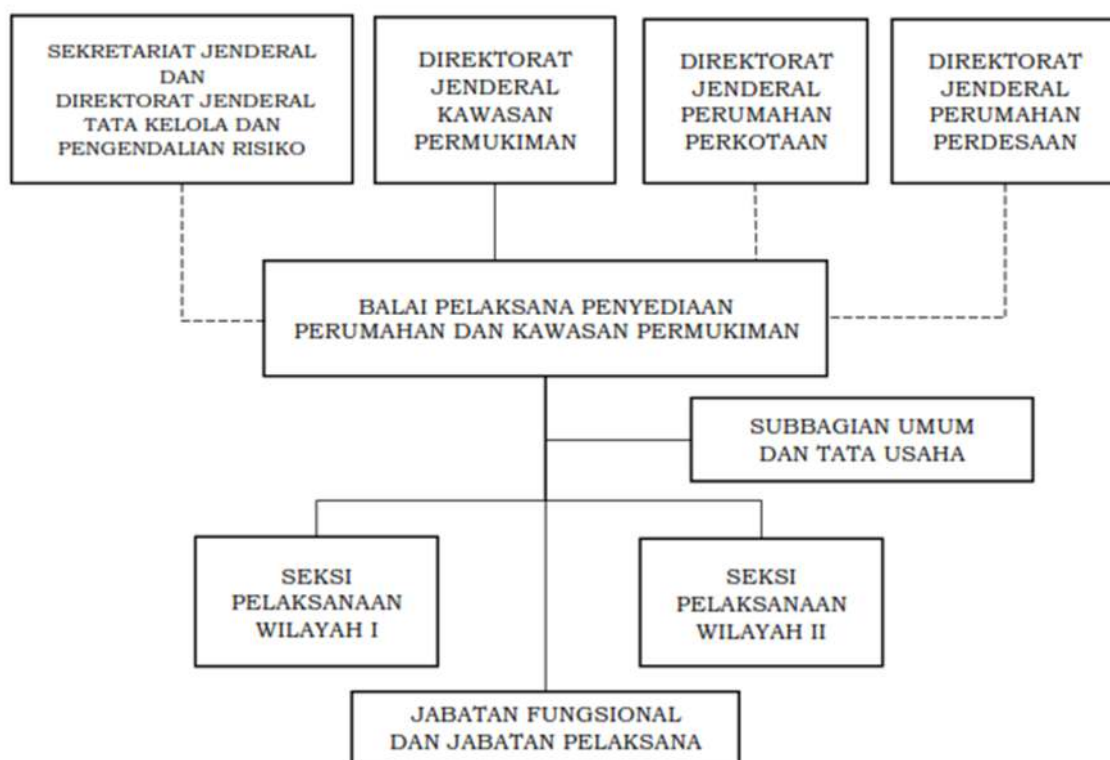
- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan,
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tanggkomunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I , sebagai berikut :

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Di bawah struktur tersebut juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai. Secara

keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.



Keterangan:

----- garis koordinasi
 ————— garis komando

Gambar 3.2 Struktur Balai P3KP Sulawesi I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA

PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan mendukung tujuan dan strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I melaksanakan sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Setiap Program dan Kegiatan memiliki indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2025-2029.

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk menjalankan program dan kegiatan penyediaan perumahan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kegiatan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp. 6, 879,117,444,000,- (Enam Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Tabel 4. 1 : Rekap Target Program Kegiatan BP3KP Sulawesi I

TABEL REKAP TARGET			
PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 - 2029
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	5
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	4
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	4
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	4
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	4
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	11
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	16
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	1,577
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	3
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	4
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	4
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni			
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya	Unit	37,922
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	8,789
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	528
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	4
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	4
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	4
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	4
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh			

1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Ha	107
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	4
2	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	5
3	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	5
4	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	4
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I			
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	20
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	20
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	16
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	8
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	16
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	20
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	4
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	4
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	4
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	4
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	4
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	16

Tabel 4. 2 : Tabel Rekap Keuangan Sasaran Program Kegiatan BP3KP Sulawesi I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	ANGGARAN 2025 - 2029
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	808,768.76
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	260,149.29
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	184,260.49
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	141,484.70
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	312,003.00
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	5,648,491.41
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1,770,732.14
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	4,689,436.93
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	823,806.00
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	1,604,253.94
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	42,704,896
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	281,361
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	2,571,034
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	390,223
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	455,261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni		
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya	995,318,750
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	4,061,417,932
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	1,034,315,675
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	383,720.20
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	15.913.69
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1,666,928
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1,066,612
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	975,560
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-

10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	520,299
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	9,067,070
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan		
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	368,545
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh		
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	238,360,000
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	352,600
2	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	974,608
3	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	1,218,458
4	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1,044,225
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I		
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	457,638,290.35
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	882,088.81
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	1,719,153.21
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	1,092,627.01
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1,452,500.19
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	3,926,614.20
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	62,869.00
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	61,269.00
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	368,545.00
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	97,556.00
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	368,545.00
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1,734,328.59
TOTAL		6,879,117,444



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai komitmen institusional dan peta jalan operasional yang terukur untuk lima tahun ke depan, memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Sulawesi I selaras dengan Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan mengoperasionalkan Misi Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Dokumen ini menjadi pedoman fundamental dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi instrumen pengendalian kinerja yang esensial, memastikan setiap intervensi di wilayah Sulawesi utara, Maluku Utara, dan Gorontalo berkontribusi langsung pada pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian. BP3KP Sulawesi I memegang peran krusial sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam kerangka Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah,.

Renstra BP3KP Sulawesi I telah merumuskan dua tujuan strategis yang terintegrasi, yang pertama adalah Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif, dan tujuan kedua yaitu Peningkatan kualitas tata kelola.

Kepala BP3KP Sulawesi I harus memastikan optimalisasi seluruh sumber daya pembiayaan yang tersedia, mengingat anggaran APBN Kementerian hanya mencakup sekitar 10% dari total kebutuhan dana untuk Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Oleh karena itu, kolaborasi pendanaan (*collaborative funding*) dengan Pemerintah Daerah (melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Dana Desa), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari sektor swasta harus diintensifkan.

Selain aspek pendanaan, pimpinan juga perlu mengarahkan implementasi teknologi konstruksi inovatif seperti sistem pra-cetak (seperti RUSPIN/RISHA) yang terbukti lebih unggul dalam kecepatan dan efisiensi biaya dibandingkan metode konvensional, sehingga mampu mengakselerasi kuantitas unit terbangun dan mendukung program percepatan pemerintah. Penekanan lain dari pimpinan adalah pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, termasuk memastikan integrasi data calon penerima bantuan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS agar ketepatan sasaran dapat

terjamin, dan memprioritaskan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di tingkat operasional Balai untuk menutup celah inefisiensi dan risiko hukum.

Mekanisme Pengukuran Capaian Kinerja BP3KP Sulawesi I akan didasarkan pada hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan terintegrasi, yang diuraikan secara rinci dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan dan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja operasional (SS-1) akan mencakup persentase realisasi unit perumahan baru, peningkatan kualitas RTLH, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta penanganan luasan kawasan kumuh terpadu. Sementara itu, kinerja manajemen (SS-2) akan diukur melalui Indeks Kualitas Tata Kelola Kementerian, Indeks Integritas Kementerian, dan Tingkat Kualitas Pengawasan Intern, yang secara kolektif memastikan pengelolaan internal yang efisien dan profesional. Pentingnya konsistensi data dan formulasi perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dijaga ketat, karena LAKIP tahunan tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai umpan balik untuk penentuan tindakan korektif yang konstruktif dalam periode Renstra.

Mekanisme Evaluasi Proses Pelaksanaan Perencanaan Strategis di BP3KP Sulawesi I akan dilaksanakan secara sistematis dan adaptif. Evaluasi ini diintegrasikan dengan kerangka Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor, yang memindahkan fokus pengendalian dari pendekatan reaktif (*problem-based*) yang hanya mengatasi masalah yang sudah terjadi, menjadi pendekatan proaktif yang mengantisipasi potensi risiko di masa depan (*forward looking*).

BP3KP wajib mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko spesifik di wilayah Sulawesi I, seperti risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa, risiko ketersediaan lahan (yang sulit didapatkan di daerah padat), dan risiko kegagalan program di kawasan rawan bencana. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala dan terpadu (real-time) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Terpadu (*e-Monev*) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan (KRISNA), sistem penganggaran (SAKTI), dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pemerintah Daerah, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar lembaga pelaksana.

Selain evaluasi kinerja, BP3KP juga harus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mengarusutamakan prinsip Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUG) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga pembangunan perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Melalui proses evaluasi yang terstruktur ini, BP3KP Sulawesi I akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



MATRIKS KINERJA BALAI P3KP SULAWESI |

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																	
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:																	
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak																	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	50,000.00	175,000.00	184,450.00	194,410.30	204,908.46	808,768.76
		2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	60,000.00	63,240.00	66,654.96	70,254.33	260,149.29
		3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		4	-	-	-	-	4	184,260.49	-	-	-	-	184,260.49
		4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	32,631.58	34,393.68	36,250.94	38,208.49	141,484.70
		5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan		1	-	-	-	-	1	312,003.00	-	-	-	-	312,003.00
		6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4		1,302,750.00	1,373,098.50	1,447,245.82	1,525,397.09	5,648,491.41
		7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	408,396	430,449	453,694	478,193	1,770,732.14
		8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		3	2	2	2	2	11	603,155.00	942,447.00	993,339.14	1,046,979.45	1,103,516.34	4,689,436.93
		9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	190,000	200,260	211,074	222,472	823,806.00
		10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	4	4	4	4	16	-	370,000	389,980	411,039	433,235	1,604,253.94
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		325	313	313	313	313	1,577	23,075,000	4,587,620	4,770,394	4,989,722	5,282,160	42,704,896
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3			88,900.00	93,701	98,760	281,361
		4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	592,975	624,996	658,745	694,318	2,571,034
		5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	90,000	94,860	99,982	105,381	390,223
		6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	105,000	110,670	116,646	122,945	455,261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		1	Jumlah Unit Rumah Swadaya	Unit		1,082	9,210	9,210	9,210	9,210	37,922	36,788,000	222,951,075	234,072,150	245,193,225	256,314,300	995,318,750
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		233	2,139	2,139	2,139	2,139	8,789	156,110,000	921,790,553	949,398,619	994,505,793	1,039,612,967	4,061,417,932

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		-	132	132	132	132	528	-	248,493,275	250,575,600	261,940,800	273,306,000	1,034,315,675
		4	Jumlah Dokumen Teknis Penyilapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	88,500.00	93,279	98,316	103,625	383,720.20
		5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		4	-	-	-	-	4	15,913.69	-	-	-	-	15,913.69
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	384,455	405,216	427,097	450,160	1,666,928
		7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	246,000	259,284	273,285	288,043	1,066,612
		8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	225,000	237,150	249,956	263,454	975,560
		9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	120,000	126,480	133,310	140,509	520,299
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	2,091,200	2,204,125	2,323,148	2,448,598	9,067,070
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	85,000	89,590	94,428	99,527	368,545
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																	
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Ha		15	32	-	40	20	107	30,000,000	67,360,000	-	92,600,000	48,400,000	238,360,000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
MR		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	52,600	75,000	100,000	125,000	352,600

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR							SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET								ANGGARAN (Rp Ribu)												
													2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL									
-1			-2											-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																																	
OUTPUT KEGIATAN:																																	
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas											Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	129,232	182,150	200,365	220,410	242,451	974,608						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																																	
OUTPUT KEGIATAN:																																	
		1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko											Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	174,233	225,000	247,500	272,250	299,475	1,218,458						
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan											Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	225,000	247,500	272,250	299,475	1,044,225						
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																																	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																																	
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																																	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I																																	
OUTPUT KEGIATAN:																																	
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)											Layanan		4	4	4	4	4	20	35,754,562.97	97,882,016.74	102,776,117.57	107,914,923.45	113,310,669.62	457,638,290.35						
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)											Layanan		4	4	4	4	4	20	58,423.92	191,100.00	200,655.00	210,687.75	221,222.14	882,088.81						
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)											Layanan		-	4	4	4	4	16	-	396,500.00	417,911.00	440,478.19	464,264.02	1,719,153.21						
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)											Layanan		-	2	2	2	2	8	-	252,000.00	265,608.00	279,950.83	295,068.18	1,092,627.01						
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)											Layanan		-	4	4	4	4	16	-	335,000.00	353,090.00	372,156.86	392,253.33	1,452,500.19						
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)											Layanan		4	4	4	4	4	20	84,199.49	891,485.68	936,059.96	982,862.96	1,032,006.11	3,926,614.20						
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)											Layanan		-	1	1	1	1	4	-	14,500.00	15,283.00	16,108.00	16,978.00	62,869.00						
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)											Layanan		-	1	1	1	1	4	-	14,131.00	14,894.00	15,698.00	16,546.00	61,269.00						
		9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)											Layanan		-	1	1	1	1	4	-	85,000.00	89,590.00	94,428.00	99,527.00	368,545.00						
		10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)											Layanan		-	1	1	1	1	4	-	22,500.00	23,715.00	24,996.00	26,345.00	97,556.00						
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)											Layanan		-	1	1	1	1	4	-	85,000.00	89,590.00	94,428.00	99,527.00	368,545.00						
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)											Layanan		-	4	4	4	4	16	-	400,000.00	421,600.00	444,366.40	468,362.19	1,734,328.59						

METODE PERHITUNGAN BALAI P3KP SULAWESI I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai P3KP Sulawesi I	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: - kegiatan 2029: - kegiatan 2026: - kegiatan 2028: - kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi								
		OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal		
		OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total : 11 laporan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 4 laporan 2029: 4 laporan 2026: 4 laporan 2028: 4 laporan Total : 16 laporan	Non Kumulatif	Internal		
		Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum						
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai P3KP Sulawesi I	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 325 unit 2027: 313 unit 2029: 313 unit 2026: 313 unit 2028: 313unit Total : 1.577 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan						
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak						
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi						
	IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3 Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: - dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
			OK 4 Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
			OK 5 Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
			OK 6 Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni						
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1.082 unit 2027: 9.210 unit 2029: 9.210 unit 2026: 9.210 unit 2028: 9.210 unit Total : 37.922 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan							
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak							
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi							
	IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 233 unit 2027: 2.139 unit 2029: 2.139 unit 2026: 2.139 unit 2028: 2.139 unit Total : 8.789 unit	Non Kumulatif	Internal
			OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 132 unit 2029: 132 unit 2026: 132 unit 2028: 132 unit Total : 528 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 4 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)			(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan										
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi										
				OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan			Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: ... laporan 2027: ... laporan 2029: ... laporan 2026: ... laporan 2028: ... laporan Total : ... laporan			Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan			Non Kumulatif	Internal
				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan			Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan										
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan			Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi								
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh								
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai P3KP Sulawesi I Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 15 Ha 2027: - Ha 2029: 20 Ha 2026: 32Ha 2028: 40 Ha Total: 107 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendatian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai P3KP Sulawesi I mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 2	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 5 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I										
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I										
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai P3KP Sulawesi I	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai P3KP Sulawesi I	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai P3KP Sulawesi I	Non Kumulatif	Internal		
				(Sekretariat Jenderal)	Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 20 layanan				
				OK 2	Jumlah Layanan Umum	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sulawesi I			Non Kumulatif	Internal
				(Sekretariat Jenderal)	Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 20 layanan				
				OK 3	Jumlah Layanan Umum	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sulawesi I			Non Kumulatif	Internal
				(Ditjen Kawasan Permukiman)	Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 16 layanan				
				OK 4	Jumlah Layanan Umum	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sulawesi I			Non Kumulatif	Internal
(Ditjen Perumahan Perdesaan)	Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 8 layanan								
OK 5	Jumlah Layanan Umum	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sulawesi I	Non Kumulatif	Internal						
					(Ditjen Perumahan Perkotaan)	Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 16 layanan			
					OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai P3KP Sulawesi I	Non Kumulatif	Internal	
(Sekretariat Jenderal)	Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 20 layanan								
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sulawesi I	Non Kumulatif	Internal						
(Ditjen Kawasan Permukiman)	Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sulawesi I	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan								

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I						
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I						
		OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai P3KP Sulawesi I Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai P3KP Sulawesi I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total : 16 layanan	Non Kumulatif	Internal